

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peneliti melihat situasi di Indonesia yaitu kondisi masyarakat Indonesia yang masih tidak bisa lepas dari kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat diukur dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, kesehatan, tempat tinggal yang memadai.

Kemiskinan sudah menjadi masalah besar di Indonesia yang sampai saat ini penanggulangannya tidak membuahkan hasil yang besar. Berbagai program telah dilaksanakan, namun masih saja kemiskinan menjadi masalah yang utama di negara kita. Tentu dengan banyaknya program yang sudah dijalankan namun belum menunjukkan hasil yang diinginkan menimbulkan banyak pertanyaan ditengah tengah pemerintah. Hal ini akan memperlambat Indonesia untuk mewujudkan menjadi negara maju.

Pada mulanya adalah kemiskinan lalu akan merujuk pada pengangguran dengan adanya pengangguran akan menimbulkan kekerasan dan kejahatan ditengah tengah masyarakat. Pengangguran yang dialami masyarakat tentu saja tidak akan mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut hal apapun akan dilakukan, akan timbul tindakan kekerasan seperti contohnya tindakan pencurian yang akan merugikan pihak lain.

Kemiskinan adalah permasalahan pokok yang dialami oleh sebagian negara di dunia. Walaupun tidak dikatakan secara seluruhnya, dengan berbeda - beda tingkat

dan jumlah orang miskin pada setiap negara, hampir tidak ada satu negara yang dapat terbebas dari masalah kemiskinan.

Berbicara tentang kemiskinan maka penulis menemukan informasi terbaru dari berita terpercaya yang telah diakui kebenarannya oleh masyarakat Indonesia yaitu berita CCN Indonesia memberitakan bahwa sesuai dengan BPS Provinsi Sumatera Utara menyebut pandemi Covid-19 telah menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat menjadi 1,343 juta per maret 2021. Terjadinya kenaikan itu, maka tingkat kemiskinan di Sumatera Utara mencapai 9,01 persen. Jumlah penduduk miskin tersebut meningkat 60.570 jiwa dan jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada maret 2020 yang sebanyak 1.283,29 ribu jiwa atau sebesar 8,75 persen dari total penduduk sumut.

Jumlah kemiskinan dikategorikan berdasarkan daerah yaitu, penduduk miskin pada maret 2020, 695,75 ribu yang di amana diantaranya hidup di wilayah perkotaan sedangkan 587,54 ribu jiwa hidup di wilayah pedesaan sementara itu pada maret 2021, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan 755,81 ribu jiwa dan ada terdapat 588,05 ribu jiwa hidup di wilayah pedesaan. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan terbesar dpat terjadi di daerah perkotaan. (Syeck Suhaimi,2021)

Presentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,61 poin (1,32 ribu ribu jiwa) dibanding tahun 2019 yaitu dari 16,60 ribu jiwa (8,75 persen) menjadi 17,92 ribu jiwa (9,36 persen).

Garis kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2020 sebesar Rp.374. 768,- per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp. 38.268,- per kapita per bulan atau meningkat sebesar 11,37 poin, bila dibandingkan kondisi tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 336,500,- per kapita per bulan.

Program Keluarga Harapan(PKH) adalah program perlindungan sosial yang bersifat memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin dan merupakan program penanggulangan kemiskinan. Kehadiran PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika memenuhi beberapa persyaratan yang terkait dengan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Kehadiran Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia diluncurkan pemerintah karena program program yang dilaksanakan dalam pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar bagi kesejahteraan di Indonesia. Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial (Depsos,2010) PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin klaster terbawah berupa bantuan bersyarat .

Kehadiran Program Keluarga Harapan (PKH) di tengah - tengah masyarakat tentunya pemerintah mengharapkan kasus kemiskinan di Indonesia akan berkurang, program ini dapat berpengaruh baik di antara program untuk pengentasan kemiskinan lainnya. Namun sering kita perhatikan bahwa diantara banyaknya program pengentasan kemiskinan yang sudah pemerintah hadirkan, namun angka kemiskinan di Indonesia masih tetap buruk. Presentasi menurunnya kasus kemiskinan di Indonesia tidak terlihat signifikan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, maka Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai tugas “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati selaku kepala daerah pada tingkat wilayah kabupaten sesuai lingkup tugas dan fungsinya”.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, peran Dinas Sosial yang menjadi aktor dalam menyukseskan PKH, terkait dengan hal tersebut dalam menyukseskan PKH ini tentu hal utama yang harus dipersiapkan adalah data yang lengkap, terbaru dan aktual namun sesuai dengan wawancara dengan ibu Harijanja selaku Kepala bagian PKH Menjelaskan bahwa ada kesulitan atau hambatan dalam PKH tersebut yang dimana terdapat pada validasi data- data penerima program keluarga harapan yang tidak lengkap .

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk membahas masalah mengenai penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan, maka penulis mengajukan judul **“Peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka bisa ditarik sebuah rumusan masalah yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini yang akan

dilakukan bisa terarah dan fokus dalam kajian yang diteliti. Adapun runusan masalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung pemerintah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ?
2. Bagaimana strategi Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui faktor faktor penghambat dan pendukung pemerintah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui startegi Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat diajdikan sebagai bahan evaluasi, informasi, dan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah untuk mengembangkan Program Keluarga Harapan berikutnya.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan program pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat dan dengan program ini diharapkan akan mencapai keberhasilan program dengan peningkatan kualitas hidup manusia yang lebih baik terutama di Indonesia.

b. Bagi Pendamping Program Keluarga Harapan

Sebagai rujukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendampingan kepada penerima Program Keluarga Harapan.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasannya Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan salah satu program pemerintah merupakan dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan jika diartikan dalam arti luas adalah seorang, keluarga, komunitas, bahkan negara yang menyatakan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancam, dan status terancam Tawar-menawar dalam hubungan dunia, hilangnya generasi, kabut wakru sebelum bangsa.

Kemiskinan adalah kekurangan sesuatu hal-hal yang biasa dimiliki seperti, makanan, pakaian, tempat tinggal dan air minum, yang erat kaitannya dengan kualitas hidup. Kemiskinan terkadang juga berarti tidak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah . Jadilah miskin dan dapatkan kehormatan yang layak didapatkan sebagai warga negara.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005 : 122)

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS, beberapa tahun terbitan) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode 2013-2020 dapat disajikan dalam Gambar 1 sebagai berikut :



Sumber : kompas.id

Gambar 1.1 Jumlah dan persentase Penduduk Miskin Indonesia

Dengan menyimak data pada Gambar 1 di atas dapat disimpulkan, bahwa presentase penduduk miskin pada September 2020 naik menjadi 10,19 persen, meningkat 0,41 persen pada maret 2020 dan meningkat 0,97 persen pada September 2019. Disebutkan, jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.

Data di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Masalah kemiskinan ini perlu dijadikan prioritas penanganan karena apabila masalah ini tidak diatasi secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan dapat menjadi pemicu munculnya permasalahan sosial yang lebih kompleks. Mendesaknya masalah kemiskinan yang dihadapi Indonesia harus segera diatasi yang didasari oleh angka kemiskinan yang relatif tinggi.



Gambar 1.2 presentase penduduk Miskin Kabupaten Humbang Hasundutan

Sumber : BPS Kab.Humbang Hasundutan

Gambar di atas menunjukkan presentase penduduk miskin di Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami kenaikan yang dimulai pada Tahun 2019 sampai 2020. Presentase kemiskinan pada Tahun 2019 mengalami penurunan dan terjadi kenaikan pada tahun 2020, hal ini diakibatkan oleh hadirnya Pandemi Covid-19 di Indonesia.

2.1.2 Indikator Kemiskinan

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami seseorang atau sekelompok orang adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh Bappenas (Harniati, 2010). Indikator kemiskinan yang dimaksud adalah :

1. Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
2. Keterbatasan akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan mendapatkan layanan kesehatan.
3. Keterbatasan akses pendidikan. Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedianya, mahalnya biaya pendidikan, terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.
4. Keterbatasan akses pada pekerjaan. Indikator ini diukur dari terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerjaan anak dan pekerja perempuan.
5. Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi. Indikator yang digunakan adalah kesulitan memiliki rumah yang sehat dan layak huni, dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak.
6. Keterbatasan akses terhadap air bersih. Indikator yang digunakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih, terbatasnya penguasaan sumber air, dan rendahnya mutu sumber air.

2.1.3 Faktor penyebab Kemiskinan

Faktor faktor penyebab kemiskinan menurut Hartomo dan Azis dalam Dadan Hudyana (2009:28-29) yang dikutip oleh Sarul Mardianto,yaitu:

1. Tingkat pendidikan yang rendah, Tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan seseorang tidak memiliki keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Kemampuan seseorang memasuki dunia kerja dibatasi oleh keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki.
2. Malas bekerja, Adanya sikap malas (pasif atau bergantung pada nasib) menyebabkan sikap apatis dan kurang semangat dalam bekerja
3. Sumber daya alam yang terbatas, Suatu masyarakat dapat dilanda kemiskinan jika sumber daya alamnya tidak lagi memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan bahwa orang miskin karena mereka memiliki sumber daya alam yang miskin.
4. Terbatasnya kesempatan kerja, Keterbatasan kerja yang terbatas akan berdampak pada kemiskinan di masyarakat. Idealnya, seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, yang notabene tidak mungkin bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan untuk mendapatkan penghasilan.
5. Keterbatasan modal, Seseorang miskin disebabkan oleh mereka tidak mempunyai modal untuk melengkap alat dan bahan yang mereka perlukan untuk menciptakan keterampilan yang mereka miliki dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.
6. Beban keluarga, Jika upaya tidak seimbang, dengan orang yang memiliki banyak anggota keluarga akan meningkatkan pendapatan mereka dan akan menyababkan kemiskinan, karena semakin banyak anggota keluarga akan meningkatkan kebutuhan hidup atau beban yang harus dipenuhi.

2.1.4 Dampak dari Kemiskinan

Setelah mengetahui penyebab dari kemiskinan, tentunya akan ada dampak dari kemiskinan yang dialami oleh setiap negara yang tak kunjung terselesaikan. Pada umumnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakatnya. Adapun yang menjadi dampak negatif dari pengangguran adalah sebagai berikut.

1. Kriminalitas Tinggi

Dampak pertama dari kemiskinan adalah tingkat kejahatan yang tinggi.

Kemiskinan sering dikaitkan dengan kejahatan, Alasannya yaitu orang miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya,

termasuk kejahatan. Beberapa kejahatan yang dimaksud berupa pencurian, perampokan, penipuan, begal, bahkan pembunuhan.

2. Akses Pendidikan Tertutup

Akses pendidikan yang tertutup merupakan dampak kemiskinan yang dapat dirasakan. Mahalnya biaya pendidikan mengakibatkan masyarakat miskin untuk memasuki dunia pendidikan. Hal ini semakin memperburuk situasi masyarakat yang kekurangan karena kurangnya pendidikan mencegah mereka untuk bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan.

3. Tingkat Pengangguran Tinggi

Dampak kemiskinan selanjutnya adalah dimana pengangguran meningkat. Rendahnya tingkat pendidikan tentunya juga akan berdampak pada pengangguran. Masyarakat miskin yang sulit mendapatkan pendidikan akan berdampak terhadap tingkat pengangguran.

4. Angka Kematian Tinggi

Dampak kemiskinan selanjutnya adalah tingkat kematian yang tinggi. Dampak ini pasti terkait dengan penyebab kemiskinan, yaitu kualitas kesehatan yang buruk.

5. Konflik terjadi di masyarakat

Hal ini diartikan bahwa akan adanya perlakuan yang berbeda antara masyarakat miskin dari masyarakat kaya. Salah satu yang menjadi contohnya seperti mendapatkan akses ke beberapa fasilitas tertentu

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable* (chamber, 1995).

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi alternatif dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya tidak optimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah topik yang menarik masyarakat karena berkaitan dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini di masa depan, terutama saat mengaitkan dengan keterampilan masyarakat masih ada kurang dalam pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat sebagai model perkembangan mendasar manusia adalah berusaha untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat yang masih dalam kemiskinan dan kelesuan. Berdasarkan sudut pandang penyelenggaraan Administrasi Negara, pemberdayaan masyarakat bukan sekedar konsep ekonomi tapi implisit berarti memaksakan demokrasi ekonomi (yaitu aktivitas perekonomian terjadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).

2.2 Tujuan pemberdayaan masyarakat

Menurut mardikanto (2015), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu":

1. Perbaikan kelembagaan. Dengan perbaikan diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring

kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya.

2. Perbaikan usaha. Setelah diupayakan perbaikan maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Di samping itu kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya.
3. Perbaikan pendapatan. Peningkatan pendapatan juga diharapkan dari seluruh anggota lembaga tersebut. Kata lainnya memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan. Bila kemiskinan terjadi, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan terjadi kemungkinan manusia melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan, karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan “fisik dan sosial” karena kerusakan lingkungan disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaikan kehidupan. Dengan pendapatan yang membaik, diharapkan ada koreksi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula.

Pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6. Perbaiki masyarakat. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.2 Peran dinas sosial

Dinas sosial adalah suatu unit pemerintah di bidang sosial yang mengurus suatu kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan kemampuan mereka di bidang berikut : memainkan peran sosial atau menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan.

Hadirnya peran dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan (PKH) untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan peran dinas sosial tidak jauh berbeda dengan pekerjaan sosial lainnya, yaitu membantu masyarakat untuk meningkatkan dan memanfaatkan kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas hidup dan menyelesaikan masalah sosial yang mereka alami. Dalam peran Dinas Sosial ini terdapat program-program pemerintah yang dapat langsung dilaksanakan untuk masyarakat yaitu program keluarga harapan (PKH).

2.3 Pengertian Program Keluarga Harapan

Permensos No 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Yang dimana Progra keluarga harapan, yang selanjutnya disebut PKH adalah program bantuan sosial bersyarat bagi keluarga atau masyarakat miskin dan rentan yang

terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, ditangani oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial, memberikan bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antara generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan millenium. Lima komponen tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu : pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender; pengurangan angka kematian bayi dan balita; pengurangan kematian ibu melahirkan.

2.3.1 Tujuan pkh

Tujuan program keluarga harapan mengacu pada peraturan menteri sosial (pemensos) nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan pasal 2 yaitu :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;

- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat miskin.

2.4 Penanggulangan kemiskinan berdasarkan peraturan presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (pasal 1) menetapkan :

1. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

3. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Nasional adalah wadah koordinasi dan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional.
4. Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi.
5. Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota.

2.5 Program Penanggulangan Kemiskinan :

Berdasarkan Peraturan presiden Republik Indonesia No.13 Tahun 2009 Tentang Kemiskinan koordinasi penanggulangan kemiskinan (pasal 4) dengan hal Program Penanggulangan kemiskinan :

Program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok program sebagai berikut :

- a. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat

miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;

- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Program penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 (tiga) klaster yaitu ;

1. Klaster 1 yaitu, bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Program pada klaster 1 bertujuan untuk mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Adapun program yang termasuk dalam klaster yaitu 1) program keluarga harapan (PKH), tujuan dari program ini yaitu mengurangi beban RTSM 2) Bantuan Operasional sekolah (BOP), tujuan dari program ini sendiri yaitu untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. program bantuan siswa miskin (BSM), program ini memiliki tujuan agar siswa dari kalangan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan di sekolah. jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS), tujuan jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh layanan kesehatan. program beras untuk keluarga miskin (RASKIN), program ini bertujuan untuk mengurangi beban

pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein.

2. Klaster 2, yaitu penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan. Adapun yang termasuk dalam klaster 2 ini yaitu 1) program nasional dalam pemberdayaan masyarakat (PNPM), program ini adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2) Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja/padat karya produktif , secara teknis konsep program ini adalah untuk membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha-usaha kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha-usaha produktif dengan memanfaatkan potensi SDA, SDM dan teknologi sederhana yang ada serta peluang pasar.
3. Klaster 3, yaitu penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Tujuan dari program klaster 3 untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Adapun yang termasuk dalam klaster ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), program ini adalah dana pinjaman dalam bentuk kredit modal kerja (KMK) dan kredit

investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp.5 juta sampai dengan Rp. 500 juta. Kredit Usaha Bersama (KUBE), tujuan dari program ini meningkatkan kemampuan anggota KUBE di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, yang ditandai dengan: meningkatnya pendapatan keluarga; meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan; meningkatnya kemampuan anggota KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun dengan lingkungan sosialnya; meningkatnya kemampuan anggota KUBE dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya.

2.6 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Dalam menanggulangi kemiskinan maka pemerintah harus menciptakan kebijakan untuk penanggulangan miskin tersebut. Adapun strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan adalah sebagai berikut : pertama, karena kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensional, maka program pengentasan kemiskinan harus mengutamakan aspek ekonomi lainnya. dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan dasar yang harus perlu di prioritaskan, namun target dalam mengatasi kemiskinan non-ekonomi harus dikejar. Kedua, untuk meningkatkan produktivitas, strategi yang dipilih adalah meningkatkan kapasitas dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan dari upaya peningkatan kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan bisnis, teknologi, perluasan jaringan dan informasi pasar. Ketiga, melibatkan seluruh proses

pengentasan kemiskinan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian, bahkan saat proses pengambilan keputusan. Keempat, strategi pemberdayaan masyarakat. pemberdayaan masyarakat yang dimaksud bukan sekedar konsep ekonomi tapi implisit berarti memaksakan demokrasi ekonomi (yaitu aktivitas perekonomian terjadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan penelitian yang telah ada sebelumnya. Perbandingan yang didapat dijadikan peneliti sebagai inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang penulis kaji :

Tabel 2.1

Kajian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Jauna (2021)	Dampak Program Keluarga Harapan terhadap kemiskinan di Desa Teluk Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi	Peran pemerintah desa melakukan pendataan keluarga miskin untuk mendapatkan bantuan dan pemerintah desa bekerja sama dengan BRI link untuk memudahkan keluarga miskin melakukan pencairan bantuan tanpa harus ke kantor pos untuk pencairan bantuan. Melakukan validasi data dan mengadakan sosialisasi setiap bulan untuk menambah pengetahuan	persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memperoleh data . Perbedaan dalam penelitian ini dimana peneliti sebelumnya membahas mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan program PKH sedangkan penelitian selanjutnya akan membahas tentang

		masyarakat penerima PKH.	strategi dalam penanggulangan kemiskinan.
Dedy Utomo	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada unit Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri)	Target pelaksanaa program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Purwosari yaitu terbantunya masyarakat tidak mampu khususnya RTSM dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan anaknya dan kesehatann ibu hamil dan balita.Hasil Evaluasi dalam jurnal ini membeuktikan bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mau melakukan dan memenuhi komitmennya dikarenakan takut adanya sanksi yang diberikan.Berdasarkan data yang ada diketahu bahwa setiap tahun nya peserta PKH mengalami penurunan	persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu fokus membahas Program Keluarga Harapan (PKH) .Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu saya membahas mengenai strategi yang dilakukan Dinas Sosial dalam penanggulangan Kemiskinan melalui Program PKH sedangkan jurnal yang ditulis oleh Dedy Utomo bersama dengan rekan lainnya membahas mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin yang dikarenakan masih tingginya jumlah rumah tangga miskin.
Jenni Efiany Lase (2021)	Analisis Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Juhar Kecamatan Bhandar Khalipah Kabupaten	efektivitas implementasi PKH khususnya pendamping PKH sebagai pelaksana program PKH terlaksana dengan baik dalam hal komunikasi,pemerintah desa dengan pendamping PKH mengadakan sosialisasi setiap 3 bulan sekali namun	Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas Program keluarga harapan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

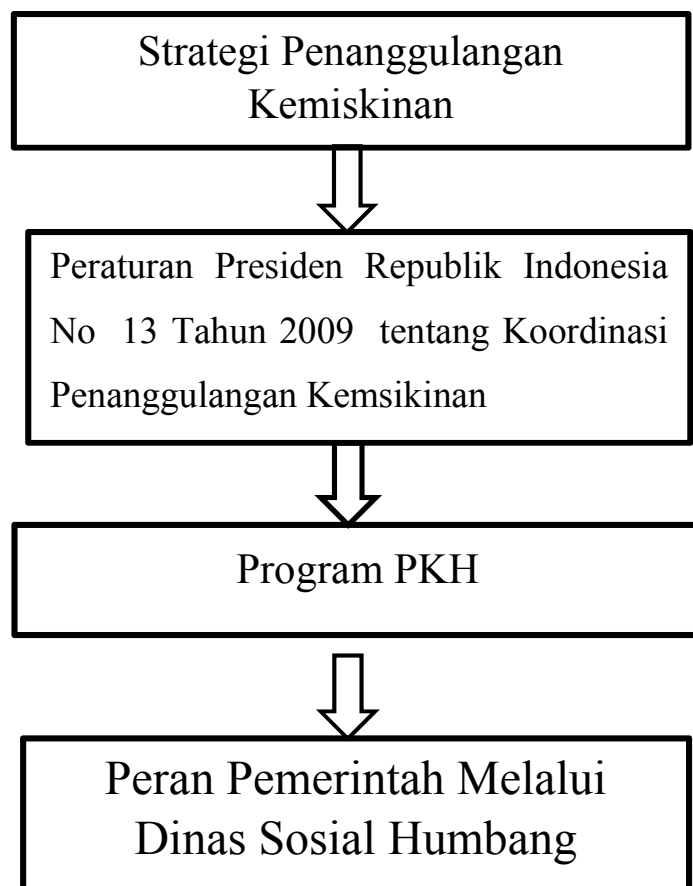
	Serdang Bedagai.	koordinasi pendamping PKH dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat tidak mengikuti pertemuan kelompok walaupun sudah dijadwalkan.	dilakukan yaitu peneliti akan membahas mengenai bagaimana cara yang akan dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan melalui Dinas Sosial dengan menerapkan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
--	------------------	--	---

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan landasan dari keseluruhan proses penelitian. kerangka berpikir mengembangkan teori yang telah disusun dan menguraikan atau menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi antara variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis antara variabel yang akan diteliti. kerangka berpikir adalah kerangka pemikiran si peneliti. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara peneliti terhadap gejala-gejala yang akan menjadi objek permasalahan.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan melalui bagian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka berpikir

Berdasarkan kerangka pemikir pada gambar 2 di atas, desain penelitian ini didasari oleh adanya fenomena kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Kemiskinan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah namun kemiskinan menjadi

tanggungjawab bersama. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemerintah membuat banyak program yang bermuara kepada masyarakat miskin dengan membuka akses atau peningkatan jangkauan masyarakat tidak mampu terhadap pelayanan publik kesehatan dan pendidikan, atau yang lebih dikenal dengan program keluarga harapan yang ditujukan untuk keluarga miskin yang berfokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan dijalankan oleh Dinas Sosial guna menyukseskan Indonesia lebih sejahtera.

Misi Program Keluarga Harapan adalah memutus rantai kemiskinan dengan mengubah perilaku dan pola pikir keluarga peserta tentang kesehatan anak dan ibu hamil, serta tingkat pendidikan anak dari keluarga sangat miskin. Kegagalan yang terkadang suboptimal atau yang diharapkan terkadang justru memiskinkan masyarakat secara struktural. Hal ini dapat terjadi dengan kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran karena terlihat adanya kecenderungan masyarakat miskin yang menerima bantuan tunai. Kualitas layanan kesehatan dan pendidikan belum optimal, dan pendapatan rendah. Masyarakat dan kurangnya pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar, perumahan, kesehatan, pendidikan dan pangan. Atas dasar inilah yang dijadikan motivasi penelitian ini untuk mengetahui Peran Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Pada penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang didengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Jenis penelitian ini berkarateristik alamiah atau bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dimana menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari hasil wawancara yang akan diamati.

Menurut Miles & Huberman,(2002:16) Analisis data adalah kegiatan yang diarahkan pada mereduksi data, menyaksikan data dan memverifikasikan data untuk menarik kesimpulan. Miles & Huberman menambahkan bahwa reduksi data adalah kegiatan pemilihan dan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpulkan. sedangkan penyajian data, adalah kegiatan penyajian informasi data yang telah terpilah dan tersusun, lalu verifikasi untuk diperiksa keabsahannya. kesimpulan data diartikan sebagai tafsiran atau interpretasi makna terhadap data.

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Lokasi yang dipilih peneliti adalah di Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan karena Dinas Sosial Humbang Hasundutan merupakan suatu dinas pemerintahan yang melaksanakan program keluarga harapan (PKH).

Pemilihan lokasi ini didasarkan pertimbangan peneliti dalam menyesuaikan konteks penelitian yang mengenai keberadaan Dinas Sosial dalam menjalankan Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan juni 2022 sampai dengan bulan juli 2022

3.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang.

2. Observasi

Kegiatan observasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

- a) Participant observer, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat (observer) secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Dalam hal ini pengamat mempunyai fungsi ganda, sebagai peneliti yang tidak diketahui dan dirasakan oleh anggota yang lain, dan kedua sebagai anggota kelompok, peneliti berperan aktif sesuai dengan tugas yang dipercayakan.
- b) Non-participation observer, yaitu suatu bentuk observasi di mana pengamat (atau peneliti) tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.

Dalam penelitian ini bentuk observasi yang dilakukan peneliti adalah participant observer yang dimana berperan aktif dalam kegiatan yang akan diamati atau yang dimaksud adalah peneliti mengadakan observasi secara langsung dilapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut sugiyono (2015 : 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang kemudian akan ditelaah.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu:

1. Informan kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahani tentang informan utama. Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi informan kunci dari penelitian ini yaitu kepala Bidang Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan (H. Sinaga)

2. Informan Utama

Informan utama adalah aktor utama dalam penelitian ini atau mereka yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan

dipelajari. Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Penanggung jawab dari Program Keluarga Harapan (Bapak Saprianto Sihotang)

3. Informan Tambahan

Informan tambahan merupakan orang yang memberikan informasi sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian. Informan tambahan ini disebut juga sebagai informan pendukung . Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama dan informan kunci. Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi informan tambahan penelitian ini yaitu masyarakat penerima Program Keluarga Harapan terdiri dari 3 orang.

3.5 Teknik analisa data

Setelah mendapatkan data dilapangan maka langkah selanjutnya yang akan peneliti lakukan adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data.

Menurut Miles dan Huberman ada beberapa tahap yang akan dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu :

- 1) Tahap Reduksi data . Tahap reduksi data adalah tahap dimana peneliti memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokannya sesuai dengan masalah yang diteliti.
- 2) Tahap Penyajian data (display data). Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagn, hubungan antara kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

- 3) Tahap Penarikan Kesimpulan. Pada tahap ini peneliti akan mengevaluasi data pada tahap reduksi sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan selama dilapangan. Hal ini dimulai dengan melakukan pengumpulan data, seleksi data, triangulasi data, pengkategorian data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan.